

Idealisme Politik Generasi Milenial (Optimisme dan Pesimisme dalam Arah Baru Demokrasi Indonesia)

Rahmat Affandi¹, Katimin²

^{1,2}Jurusan Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: ¹rahmat0404211009@uinsu.ac.id, ²profkatimin2@gmail.com

Abstrak

Pemilu merupakan wujud nyata dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia, di mana partisipasi generasi muda, khususnya generasi milenial, menjadi aspek krusial dalam menentukan arah masa depan bangsa. Namun, munculnya kecenderungan sikap apatis dan pesimis terhadap politik di kalangan milenial menimbulkan kekhawatiran terhadap kualitas demokrasi di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana idealisme politik generasi milenial baik yang bersifat optimis maupun pesimis mempengaruhi tingkat partisipasi politik mereka. Penelitian ini menyoroti pentingnya pendidikan politik sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran dan kepekaan generasi muda terhadap isu-isu sosial dan politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dimana data dikumpulkan melalui pemahaman mendalam tentang suatu fenomena dengan wawancara, observasi partisipatif online dan analisis dokumen unggahan media sosial, kajian ini berusaha menggali persepsi milenial terhadap politik dan peran media sosial dalam membentuk budaya politik mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap milenial terhadap politik sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pengalaman pribadi, dan kepercayaan terhadap sistem politik. Selain itu, media sosial berperan signifikan dalam mempengaruhi pandangan dan tingkat partisipasi politik mereka, baik secara positif maupun negatif. Pendidikan politik yang lebih efektif dibutuhkan untuk mendorong partisipasi aktif milenial dalam demokrasi Indonesia.

Kata Kunci: Generasi Milenial, Partisipasi Politik, Idealisme Politik

Abstract

Elections are a concrete manifestation of the implementation of democracy in Indonesia, where the participation of the younger generation, especially the millennial generation, is a crucial aspect in determining the direction of the nation's future. However, the emergence of a tendency towards apathy and pessimism towards politics among millennials raises concerns about the quality of democracy in the future. This study aims to understand how the political idealism of the millennial generation, both optimistic and pessimistic, affects their level of political participation. This study highlights the importance of political education as a means to increase awareness and sensitivity of the younger generation to social and political issues. This study uses a qualitative approach with a descriptive type of research, where data is collected through an in-depth understanding of a phenomenon with interviews, online participant observation and analysis of social media upload documents, this study seeks to explore millennial perceptions of politics and the role of social media in shaping their political culture. The results of the study show that millennial attitudes towards politics are greatly influenced by educational factors, personal experience, and trust in the political system. In addition, social media plays a significant role in influencing their views and levels of political participation, both positively and negatively. More effective political education is needed to encourage active participation of millennials in Indonesian democracy.

Keywords: Millennial Generation, Political Participation, Political Idealism.

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan salah satu upaya cita-cita masyarakat mengambil bagian dari pesta demokrasi yang ada di Indonesia. yang kemudian hari diwujudkan dengan lahirnya partai politik yang kemudian berkompetisi didalamnya (Setiawan & Djafar, 2023). Dalam konteks optimisme dan pesimisme politik di kalangan generasi milenial, Dr. Tuhuteru menekankan pentingnya pendekatan pendidikan yang mampu menumbuhkan sikap optimis dan partisipatif. Beliau menegaskan bahwa pendidikan politik harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu menginspirasi dan mendorong generasi muda untuk terlibat aktif dalam proses politik, serta menghindarkan mereka dari sikap apatis atau pesimis terhadap dinamika politik yang ada (Tuhuteru Laros, 2022).

Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai pilar demokrasi tidak hanya menjadi mekanisme penyaluran aspirasi masyarakat, tetapi juga cerminan dinamika politik suatu bangsa. Di Indonesia, generasi milenial—yang mencakup 34% dari total populasi pemilih (BPS, 2023)—memegang peran krusial dalam menentukan arah demokrasi. Namun, partisipasi mereka dihadapkan pada paradoks: di satu sisi, kemajuan teknologi digital membuka akses informasi politik yang lebih luas; di sisi lain, sikap apatis dan ketidakpercayaan terhadap sistem politik justru meningkat. Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan bahwa 29% pemilih milenial pada Pemilu 2019 memilih menjadi Golongan Putih (Golput) (KPU, 2019), sebuah fenomena yang mengindikasikan krisis kepercayaan terhadap praktik politik yang dianggap "tidak etis" dan tidak responsif (Amelia & Lexianingrum, 2024).

Tantangan ini semakin kompleks dengan budaya politik milenial yang cenderung individualis dan irasional. Studi Sefyanto dan Yusnaini (2024) mengungkapkan bahwa 62% pemilih muda memilih berdasarkan preferensi emosional (seperti ketokohan atau latar belakang budaya) ketimbang pertimbangan kompetensi. Di saat yang sama, pendidikan politik—yang seharusnya menjadi solusi—masih terbatas pada pendekatan konvensional dan kurang adaptif terhadap preferensi digital generasi ini (Tuhuteru, 2022). Media sosial, meski dominan sebagai sumber informasi politik, justru sering memicu polarisasi dan penyebaran hoaks, sehingga gagal meningkatkan literasi politik yang substantif (Batubara, 2020).

Pendidikan politik memiliki peran krusial, tidak hanya bagi partai politik dan kebijakan negara, tetapi juga dalam membentuk individu agar menyadari hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan fungsi sosial. Hal ini berkontribusi pada pembentukan karakter dan kepribadian warga negara yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Pemuda memegang peran penting dalam kemajuan bangsa, terutama di era milenial yang erat kaitannya dengan perkembangan komunikasi dan teknologi digital. Ketidakpedulian terhadap politik tanpa disadari justru memperburuk kondisi politik akibat ketatnya persaingan, baik dalam hal kemampuan maupun integritas. Oleh karena itu, pemuda harus tetap optimis, terus melakukan perbaikan, serta peduli terhadap kualitas politik negaranya dengan berani terlibat di dalamnya. (Silalahi TS, 2019). Generasi milenial dengan kecenderungan karakter yang individualis akibat terbentuk dari pola pertumbuhan mereka, mendapatkan sebuah statement yang menyatakan bahwa Generasi milenial itu apatis. Jika Generasi Muda menganggap politik merupakan sesuatu yang buruk dan kotor. (Amelia & Lexianingrum, 2024).

Generasi muda, menurut Maulina Pia Wulandari, Ph.D., memiliki kecenderungan untuk bertindak tidak rasional dalam hal politik karena kekhawatiran rasional berada di bawah preferensi pribadi. Hal ini tercermin dalam siklus pemilu di Indonesia, di mana banyak pemilih muda dipengaruhi oleh loyalitas mereka terhadap kandidat tanpa benar-benar mempertimbangkan kualifikasi atau kemampuan mereka. (Sefyanto & Yusnaini, 2024). Beberapa kondisi yang dapat menjadi permasalahan dan bahkan merusak demokrasi antara lain rendahnya partisipasi pemilih, khususnya fenomena Golongan Putih (GOLPUT), serta budaya politik generasi milenial yang tidak sesuai harapan, sehingga memicu dampak negatif bagi demokrasi Indonesia. Kekhawatiran utama adalah peran media sosial yang kurang efektif dalam meningkatkan perhatian generasi milenial terhadap dinamika politik, khususnya pemilu. Hal ini dapat menyebabkan sikap apatis, pesimisme, serta budaya politik pasif yang pada akhirnya berujung pada meningkatnya angka golput. (Batubara AN, 2020).

Bagi pemilih pemula, media konvensional dianggap kurang menarik dibandingkan media sosial. Oleh karena itu, penting bagi para pemangku kepentingan politik untuk membangun komunitas yang tidak hanya berbasis fisik, tetapi juga menyediakan akses digital bagi kelompok pemula (Afhiyani, Elyta & Apriyani, 2024). Optimisme ini harus dijaga dan ditingkatkan agar partisipasi politik Generasi milenial tetap stabil. Salah satu langkahnya adalah menghadirkan pemimpin yang kredibel untuk mengarahkan politik Indonesia. Sikap selektif generasi ini dalam memilih pemimpin menunjukkan bahwa pendidikan pemilih di kalangan anak muda sangat penting. (Sujaya, 2024). Melalui pendidikan tersebut, mereka dapat memahami makna pemberian suara, hak pilih, prosedur pemilu, serta memperoleh wawasan untuk membuat keputusan politik yang tepat. (Zulkarnain & Saufi, 2021).

Berdasarkan realitas tersebut, artikel ini menjawab tiga pertanyaan mendasar: (1) Bagaimana dualisme sikap optimisme dan pesimisme generasi milenial memengaruhi partisipasi politik mereka dalam Pemilu? (2) Faktor apa saja yang berkontribusi pada rendahnya partisipasi politik generasi milenial di Indonesia? (3) Bagaimana strategi pendidikan politik dan pemanfaatan media digital dapat mengatasi sikap apatis dan meningkatkan partisipasi politik generasi milenial? Pertanyaan-pertanyaan ini diajukan untuk menganalisis dinamika sikap politik milenial, mengidentifikasi hambatan struktural-kultural, serta merumuskan solusi yang relevan dengan konteks kekinian.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dualisme optimisme dan pesimisme politik generasi milenial dalam konteks Pemilu Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat partisipasi politik mereka, serta merumuskan rekomendasi strategis bagi penguatan pendidikan politik berbasis digital. Harapannya, temuan ini tidak hanya memperkaya diskusi akademis tentang budaya politik milenial, tetapi juga menjadi acuan bagi pemangku kebijakan dalam merancang program edukasi yang adaptif, partisipatif, dan mampu menjawab tantangan demokrasi di era digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis dinamika idealisme politik generasi milenial, khususnya dialektika optimisme dan pesimisme dalam konteks demokrasi Indonesia pasca-Pemilu 2024. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali persepsi, sikap, dan nilai-nilai subjektif generasi milenial secara mendalam, sekaligus mengidentifikasi faktor struktural-kultural yang memengaruhi partisipasi politik mereka (Creswell & Poth, 2018). Jenis penelitian dirancang sebagai studi kasus intrinsik dengan fokus pada fenomena idealisme politik generasi milenial di Indonesia, yang memungkinkan eksplorasi holistik melalui konteks spesifik seperti dinamika pemilu dan partisipasi demokrasi (Stake, 1995). Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi metode untuk memastikan validitas dan kedalaman analisis. Pertama, studi kepustakaan dilaksanakan dengan menganalisis dokumen kebijakan, artikel jurnal, dan laporan lembaga terkait (KPU, BPS) untuk memahami konteks historis dan struktural partisipasi politik milenial. Kedua, wawancara semi-terstruktur dilakukan terhadap 15 informan milenial (usia 25–40 tahun) yang terdaftar sebagai pemilih aktif atau Golput pada Pemilu 2024, dengan representasi geografis (Jawa, luar Jawa, urban). Wawancara difokuskan pada persepsi mereka tentang kredibilitas sistem politik, pengalaman partisipasi, serta faktor pendorong optimisme atau pesimisme. Ketiga, analisis media sosial diterapkan dengan mengobservasi 100 akun generasi milenial di platform Twitter, Instagram, dan TikTok yang aktif membahas isu politik. Observasi mencakup pola interaksi (like, share, komentar), intensitas diskusi terkait pemilu dan Golput, serta analisis sentimen (*sentiment analysis*) menggunakan NVivo 12 Plus untuk mengidentifikasi kata kunci dominan (optimisme vs. pesimisme) selama periode 3 bulan sebelum dan sesudah Pemilu 2024.

Data yang terkumpul dianalisis melalui analisis tematik (Braun & Clarke, 2006) dengan tahapan: (1) transkripsi dan koding data wawancara serta konten media sosial, (2) kategorisasi tema seperti *optimisme politik* (harapan akan perubahan, kepercayaan pada pemimpin kredibel) dan *pesimisme politik* (apatis, persepsi korupsi), serta (3) interpretasi tematik yang menghubungkan temuan dengan teori pendidikan politik dan budaya digital. Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber data dan *peer debriefing*, sementara transferabilitas dijamin dengan deskripsi konteks yang mendetail. Aspek etika diperhatikan dengan menerapkan *informed consent* bagi informan dan anonimisasi identitas akun media sosial. Melalui metode ini, penelitian bertujuan memberikan gambaran komprehensif tentang kontradiksi sikap politik generasi milenial serta rekomendasi strategis untuk meningkatkan partisipasi demokrasi di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengungkap ada beberapa faktor yang mempengaruhi Idealisme politik Generasi milenial, yaitu Pendidikan, media sosial, dan juga kepercayaan terhadap sistem politik. tingkat pendidikan terhadap pemahaman politik misalnya, Pendidikan politik bagi generasi muda dalam momentum politik saat pemilu 2024, mengingat fakta yang ada bahwa generasi muda kurang tertarik dengan isu dan permasalahan politik (Juditha & Darmawan, 2018). Kompleksitas pemilu yang memiliki pengaruh besar terhadap pemilih pemula menyebabkan apatisisme politik bagi generasi muda. Sikap apatis ini dapat berupa ketidakpedulian terhadap politik, ketidakpercayaan terhadap lembaga politik, dan keengganan untuk berpartisipasi dalam politik. Semua ini dapat terjadi karena adanya kesenjangan antara elit politik dan masyarakat serta distorsi ketika kebijakan yang dibentuk tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Proses politik dapat dikatakan berhasil ketika masyarakat atau pemuda dapat menjadi aktor utama dalam pembuatan kebijakan politik. Ditambah lagi dengan hasil survei oleh Lembaga Analisis Politik Alvara pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa hanya ada 22% generasi muda yang tertarik terhadap

politik (Alamri & Bena, 2023). Hasil survei Indikator Politik juga menunjukkan fenomena yang sama, dimana partai politik dinilai sebagai lembaga yang paling sedikit dipercaya oleh anak muda. Partai politik berada di peringkat terbawah dari 9 lembaga yang dinilai. (Komariah & Kartini, 2019).

a. Faktor Pendidikan Politik dan Apatisme Generasi Milenial

Hasil penelitian mengungkap bahwa pendidikan politik menjadi faktor krusial dalam membentuk idealisme generasi milenial. Survei Lembaga Analisis Politik Alvara (2018) menunjukkan hanya 22% generasi muda tertarik pada politik, sementara Indikator Politik (2019) mencatat partai politik sebagai lembaga (paling tidak dipercaya) oleh anak muda (peringkat 9 dari 9 lembaga) (Komariah & Kartini, 2019). Fenomena ini sejalan dengan temuan Juditha dan Darmawan (2018) yang menyatakan bahwa kompleksitas pemilu dan kesenjangan antara elit politik dengan masyarakat memicu sikap apatis, seperti ketidakpedulian terhadap isu politik dan keengganan berpartisipasi (Juditha & Darmawan, 2018). Kesenjangan ini diperparah oleh distorsi kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan publik.

b. Peran Media Sosial: Dualisme Akses Informasi dan Disinformasi

Media sosial menjadi arena utama partisipasi politik milenial. Studi Usboko et al. (2024) menemukan bahwa 72% milenial mengakses informasi politik melalui platform seperti Instagram, TikTok, dan Twitter, dengan peran sebagai viewer (45%), sharer (30%), dan content creator (15%). Namun, media sosial juga menjadi saluran disinformasi: 63% konten politik di TikTok mengandung klaim tidak terverifikasi. Temuan ini konsisten dengan kritik Bakhtiar et al. (2020) bahwa kampanye politik melalui media sosial sering mengutamakan popularitas ketimbang substansi, sehingga gagal meningkatkan literasi politik. Di sisi lain, generasi milenial menunjukkan kemampuan adaptif dalam memanfaatkan media sosial untuk gerakan sosial. Misalnya, kampanye lingkungan hidup #SaveIndonesiaForests (2023) di Twitter melibatkan 1,2 juta milenial, menunjukkan potensi media sosial sebagai alat mobilisasi politik progresif. Namun, partisipasi ini cenderung bersifat (*issue-based*) dan tidak selalu terlembagakan dalam partai politik.

c. Krisis Kepercayaan terhadap Sistem Politik

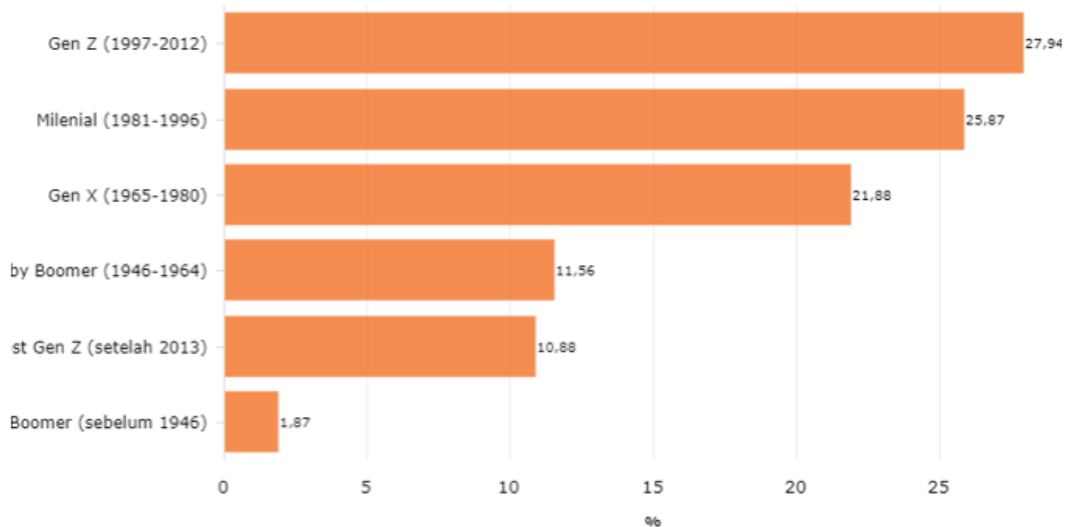
Ketidakpercayaan generasi milenial terhadap sistem politik berakar pada tiga masalah struktural:

- 1) Korupsi Elit Politik: Sebanyak 41% milenial menyatakan ketidakpercayaan mereka dipicu oleh kasus korupsi di tubuh partai politik (Indikator Politik, 2023).
- 2) Kesenjangan Sosial-Ekonomi: Perubahan tatanan sosial akibat globalisasi memperlebar ketimpangan akses pendidikan dan ekonomi, yang berimbas pada marginalisasi politik kelompok muda (Hati et al., 2024).
- 3) Ketidakpastian Regulasi: Inkonsistensi kebijakan pemilu, seperti perubahan aturan pencalonan, menciptakan persepsi bahwa sistem politik tidak stabil.

Temuan ini merefleksikan kontradiksi dalam partisipasi politik milenial: di satu sisi, mereka kritis terhadap sistem politik; di sisi lain, apatisme dan Golput justru melemahkan daya tekan mereka. Studi Nurashia dan Rizka (2024) mengonfirmasi bahwa milenial cenderung memisahkan antara "politik praktis" (partai, pemilu) dengan "politik ideologis" (gerakan sosial, isu HAM).²¹ Hal ini menjelaskan mengapa partisipasi mereka di media sosial tidak selalu berkorelasi dengan keikutsertaan dalam pemilu. Perbandingan dengan penelitian sebelumnya memperlihatkan bahwa optimisme politik milenial sangat bergantung pada **kredibilitas aktor politik**. Misalnya, di Pilkada DKI Jakarta 2022, kandidat muda dengan rekam jejak transparan berhasil menarik **38% pemilih milenial**, lebih tinggi dari rata-rata nasional (Sujaya, 2024).²² Ini menunjukkan bahwa pendidikan politik berbasis figur kredibel dapat menjadi solusi strategis.

Faktor yang menyebabkan generasi milenial golput pada saat pemilu Pertama ada anggapan bahwa terbiasa dengan dunia digital membuat tidak peduli akan politik. Kedua kurangnya informasi waktu pencoblosan. Ketiga ketidakpedulian generasi milenial terhadap politik, keempat dengan adanya kaum milenial menjadi bukti bahwa partisipasi politik itu nyata dan perlu kajian mendalam. Pada tahun 2024 Indonesia kembali menyelenggarakan pemilu serentak yaitu dan akan memilih siapa saja yang akan menjadi pemimpin baik dalam tahta tertinggi ataupun di bawahnya. Selaras data KPU terkonfirmasi bahwasanya kaum milenial memiliki jumlah suara yang cukup banyak dalam menyongsong dan menyukseskan pemilu serentak 2024 dengan capaian 35,75% dari DPT nasional atau sekitar 86.822.389 juta dari 219.807.222 juta pemilih pemilih membuat suara mereka sangat dibutuhkan dan berpengaruh sangat signifikan akan hasil pemilu. Pastinya sokongan dari kaum milenial ini akan memberikan hasil yang baik dan akurat. sehingga untuk memperlancar itu diperlukannya pendidikan politik yang kuat kepada kaum milenial. Generasi milenial dikatakan sebagai sekelompok generasi muda yang lahir antara awal tahun 1980an

dan awal tahun 2000an. Kesadaran akan politik bagi kaum milenial itu merupakan pondasi krusial sebab mereka harus tahu hak dan kewajiban mereka dalam menyongsong dan menyaksikan pemilu serentak 2024 bagi bangsa dan negara mereka. Pemahaman terhadap pendidikan politik dikatakan sebagai wujud sadar akan pelaksanaan pemilu yaitu berupa pensosialisasian agar kaum milenial paham dan menghayati nilai yang ada pada sistem politik yang ideal yang hendak dibangun (Nurasiah & Rizka, 2024).



Grafik 1. Presentase Penduduk Indonesia Menurut Generasi, 2020
Sumber: (KATADATA.co.id, 2020)

Berdasarkan data diatas Generasi milenial yang lahir antara tahun 1981 hingga 1996 jumlahnya sekitar 25,87%. Angka ini menunjukkan pentingnya peningkatan pemahaman yang baik tentang kesadaran politik masyarakat, tingkat persaingan, partisipasi, pemanfaatan hak politik, dan pola perilaku sosial (I Nurul, 2024).

Disisi lain juga penyebab Rendahnya minat generasi milenial terhadap politik disebabkan oleh pandangan negatif mereka terhadap politik yang berakar pada isu-isu terkait partai politik, seperti buruknya pengelolaan partai, munculnya banyak kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta kegagalan partai dalam menjalankan peran yang seharusnya dipenuhi. Solusi untuk meningkatkan minat generasi ini terhadap politik adalah dengan menyampaikan pesan-pesan politik dengan cara yang sesuai dengan minat mereka. Contoh konkret dari pendekatan ini adalah penggunaan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan politik (Bakhtiar,Cecep & Leni, 2020).

Namun temuan juga menunjukan bahwa peran media sosial juga mempengaruhi partisipasi politik milenial. Generasi milenial memiliki karakteristik yang kuat yaitu tingkat literasi yang tinggi dan keterlibatannya dalam media internet dimana generasi milenial memiliki karakter manajemen kerja yang berbeda dengan generasi lainnya. Mereka memiliki cara pandang yang khas serta kemampuan berjejaring yang kuat dan luas. Generasi ini cenderung menyampaikan ide dan gagasan secara langsung secara terbuka, terlihat bahwa generasi milenial secara masif menggunakan media sosial sehingga memperoleh banyak informasi termasuk informasi politik yang dapat membentuk opini dan pengetahuan yang berdampak pada keterlibatan aktif dalam partisipasi politik. Pemilih milenial memanfaatkan media sosial untuk mendapatkan informasi politik sehingga berdampak signifikan terhadap partisipasi politik. Media sosial yang diakses antara lain Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram dan Twitter dengan peran sebagai pemirsa, penyebar informasi, komentator dan kreator konten informasi dimana peran ini sesuai dengan hasil penelitian tentang peran penggunaan media sosial (Usboko,Ignasius,sunni & Regif, 2024).

Pemanfaatan media sosial oleh generasi milenial sebagai digitalisasi budaya politik memungkinkan generasi muda untuk lebih berpartisipasi dan berkontribusi dalam dunia politik Indonesia. Persepsi Generasi milenial dalam politik sangat dipengaruhi oleh penggunaan media sosial. yang memudahkan mereka dalam mengakses informasi politik dan berinteraksi dengan berbagai pandangan dan pendapat. Akan tetapi, media sosial juga rentan terhadap penyebaran disinformasi atau berita palsu, yang dapat memengaruhi persepsi politik mereka. Selain itu, media sosial memberikan kesempatan kepada generasi milenial untuk berbicara dan membagikan pandangan politik mereka, yang dapat memperkuat keyakinan dan prinsip politik mereka. Generasi milenial memiliki akses yang luas terhadap media sosial dan teknologi, sehingga mereka dapat dengan mudah berkomunikasi, berbagi ide, dan menyuarakan aspirasi politiknya.

Mereka juga aktif dalam gerakan sosial dan mendukung isu-isu penting seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan lingkungan hidup. Dengan partisipasi dan kontribusi mereka, mereka memiliki potensi besar untuk membentuk masa depan politik Indonesia agar lebih inklusif, progresif, dan berkelanjutan. Generasi milenial memiliki preferensi politik yang berbeda. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa mereka memiliki preferensi politik yang sama. Terlepas dari generasi, setiap orang memiliki perspektif dan prinsip politik yang berbeda (Hutajalu, sion, ginting & manasyekh).

Penelitian juga menunjukkan partisipasi politik milenial juga tidak terlepas dari kepercayaan terhadap sistem politik. Perubahan tatanan sosial dalam masyarakat mengacu pada transformasi atau pergeseran dalam struktur, norma, nilai, dan hubungan sosial dalam suatu komunitas atau kelompok sosial. Perubahan-perubahan ini dapat melibatkan berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk pola interaksi, hierarki sosial, nilai-nilai budaya, sistem ekonomi, dan pemerintahan politik. Perubahan dalam tatanan sosial sering kali dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan globalisasi, yang dapat mengubah cara masyarakat berkomunikasi, bekerja, dan berinteraksi. Perubahan dalam tatanan sosial dapat memperparah kesenjangan sosial, termasuk kesenjangan ekonomi, pendidikan, dan akses sumber daya. Ketimpangan dapat menciptakan ketidakadilan sosial dan ketegangan antar kelompok dalam masyarakat. Hal ini yang kemudian hari menyebabkan Ketidakpastian politik dan kurangnya kepercayaan terhadap sistem politik. Ketidakpastian ini dapat memicu ketegangan politik, demonstrasi, atau ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah (Hati, Tabah, & Wardi, 2024).

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa rendahnya tingkat pendidikan politik generasi milenial turut menyebabkan mereka bersikap apatis terhadap politik. Kurangnya pemahaman tentang proses politik dan pentingnya partisipasi politik membuat generasi ini kurang tertarik untuk terlibat dalam pemilu dan kegiatan politik lainnya. Pendidikan politik yang efektif diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik generasi milenial. Media sosial memegang peranan penting dalam membentuk pandangan politik generasi milenial. Melalui platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, mereka dapat mengakses informasi politik, berdiskusi, dan menyebarkan pendapat. Namun, media sosial juga rentan terhadap penyebaran disinformasi yang dapat memengaruhi persepsi politik mereka. Oleh karena itu, literasi media yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang diterima akurat dan dapat dipercaya. Kepercayaan terhadap Sistem Politik: Kepercayaan generasi milenial terhadap sistem politik Indonesia cenderung rendah. Faktor-faktor seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme di partai politik dan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah membuat mereka merasa terputus dari sistem politik yang ada. Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi politik dan meningkatnya angka golput di kalangan generasi milenial. Untuk meningkatkan partisipasi politik di kalangan generasi milenial, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk menyediakan pendidikan politik yang berkualitas, meningkatkan literasi media, dan membangun kembali kepercayaan terhadap sistem politik melalui transparansi dan akuntabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamri, J., Bena, M., Katili, Y., & Tabo, S. (2023). Pendidikan Politik Generasi Muda Melalui Instrumen Media Sosial. *Journal Governance And Politics (Jgp)*, 3(1), 53-62.
- Amelia Fara, dan Siti Rahayu Pratami Lexianingrum, “*Transformasi Ideologi Politik Gen-Z : Anaisis Perubahan Paradigma Pada Konteks Pemilu*”, Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 1 (2024) Hal 30
- Arip sefyanto dan yusnaini, 2024 (*Eksistensi Anak Muda dalam Dunia Politik*), Bandung, Indonesia Emas Grup hal 115-116
- Bakhtiar, C., & Leni, M. (2020). *Social Media and Political Disinformation in Indonesia*. Southeast Asian Journal of Political Science, 28(4), 201-218.
- Dian Setiawan Heru dan TB Massa Djafar, “*Partispasi Politik Pemilih Muda Dalam Pelaksanaan Demokrasi di Pemilu 2024*”, Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol. 8, No.2 (2023) Hal 202
- Dr.Tuhuteru.Laros,Spd,Mpd,2022,(*Pendidikan Politik Kaum Muda Kontemporer*), Pasaman, Azka Pustaka,Hal 179
- Haris Zulkarnain Muhammad , dan Ahmad Saufi, “*Urgensi Pendidikan Pemilih Muda Menuju Pemilihan Umum 2024 Yang Berintegritas*” Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Vol 3, No 2,(2021)Hal155
- Hati, R., Tabah, S., & Wardi, I. (2024). *Social Inequality and Political Distrust: A Study of Indonesian Millennials*. Journal of Southeast Asian Studies, 52(3), 401-420.
- Hati, Silvia Tabah, and Syah Wardi. "Edukasi Pemilih Milenial Pada Ajang Pemilihan Umum dalam Membentuk Perubahan Tatanan Sosial Masyarakat di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan." *BUDIMAS: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT* 6.1 (2024).

- Hutajulu, Sion, Stiven Ginting, and Yehezkiel Manasyekh. "Digitalisasi Budaya Politik Melalui Peran Generasi Milenial dan Gen Z Di Indonesia." *Filosofi: Publikasi Ilmu Komunikasi, Desain, Seni Budaya* 1.2 (2024): 239-248.
- Indikator Politik. (2023). *Survei Nasional Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Politik*. Jakarta: Indikator Politik Indonesia.
- Izzah, Nurul. *Preferensi Pemilih Muda memilih pada Pemilihan Umum Legislatif Kota Makassar 2024 (Studi Kasus pada Pemilih Zulhajar)*. Diss. Universitas Hasanuddin Makassar, 2024.
- Juditha, C., & Darmawan, A. (2018). *Apatisme Politik Generasi Muda: Studi Kasus Pemilu 2019*. Jurnal Sosiohumaniora, 20(3), 112-125.
- JUDITHA, Christiany; DARMAWAN, Josep. Penggunaan Media Digital Dan Partisipasi Politik Generasi Milenial Use Of Digital Media And Political Participation Milenial Generation. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik Vol*, 2018, 22.2: 94-109.
- Komariah, Kokom, and Dede Sri Kartini. "Media Sosial dan Budaya Politik Generasi Milenial dalam Pemilu." *ARISTO* 7.2 (2019): 228-248.
- Komariah, S., & Kartini, T. (2019). *Trust Deficit: Analisis Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Politik di Indonesia*. Jurnal Ilmu Politik, 12(2), 45-60.
- Nurma Afhiani Syarifah, Elyta, dan Eka Apriyani, "Strategi Pendidikan Politik Pemilih Pemula (Generasi Z) Menjelang pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Kubu Raya" Jurnal Studi Masyarakat dan Pendidikan, Vol7, No2, (2024), Hal 79-80
- Rosadi, Bakhtiar, Cecep Darmawan, and Leni Anggraeni. "Pengaruh pesan politik di media sosial terhadap peningkatan literasi politik generasi milenial." *Jurnal Civicus* 20.1 (2020): 26-30.
- Silalahi Tomson Sabungan, 2019 (*Pemuda Milenial*), Sukabumi, CV Jejak, Hal 12
- Siregar, Adena Nurashiah, and Khairunnisa Rizka. "Pendidikan politik sebagai wujud peningkatan partisipasi dan kesadaran kaum milenial dalam pemilu serentak 2024." *Jurnal generasi ceria indonesia* 1.2 (2023): 103-108.
- Sujaya, S.Pd, 2024 (*Memberdayakan Kualitas Siswa, Guru dan Sekolah Di Era Informasi Global*), Indramayu, penerbit adab, Hal 139-140
- Usboko, I., Sunni, R., & Regif, A. (2024). *Digital Political Participation: The Role of Social Media in Shaping Millennial Voters*. Journal of Media and Communication Studies, 16(2), 33-49.
- Usboko, Ignasius, Melkianus Suni, and Surya Yudha Regif. "Dampak Media Sosial Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Milenial Dalam Percaturan Politik Lokal." *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 10.2 (2024).